

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN PENDIDIKAN MENGENAI KESENJANGAN DAN PENYIMPANGAN DI SDN NO 50/VI LUBUK MENTILIN

Sukmawati¹, Subhanadri²,
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
Sukmawatisukma1984@gmail.com inet.subhanadrii@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mengenai kesenjangan dan penyimpangan di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif dengan menggunakan *Discrepancy Model*. Pengukuran efektivitas program dilakukan dengan membandingkan dua hal yang terletak pada ujung program, yaitu permulaan dan akhir pelaksanaan program, yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi riil tentang standar kepala sekolah. Variabel diukur dengan instrumen berupa kuesioner.

Hasil menunjukkan bahwa ada dua pokok permasalahan yaitu kesenjangan dan penyimpangan di lingkungan sekolah dasar di Desa Lubuk Mantilin. Adapun hasil penelitian pertama sebagai berikut: pertama kesenjangan meliputi beberapa hal, a). Kesenjangan kualitas kepemimpinan b). Kesenjangan sumber daya c). Kesenjangan perlakuan d). Kesenjangan dalam implementasi e). Kesenjangan komunikasi dan adapun hasil kedua sebagai berikut beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi a). Penyimpangan administratif b). Penyimpangan etika c). Penyimpangan dalam pelaksanaan kurikulum d). Penyimpangan kepala sekolah dalam penilaian. dari kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tindakan untuk mengatasi dan menegur terjadinya kesenjangan dan penyimpangan di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Kata kunci: *Kepala sekolah, pemimpin pendidikan, kesenjangan dan penyimpangan.*

Abstract

This research aims to find out the principal as an educational leader regarding gaps and deviations at SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Anchor. This research includes evaluative research using the Discrepancy Model. Measuring the effectiveness of the program is carried out by comparing two things at the end of the program, namely the beginning and end of program implementation, namely comparing ideal conditions with real conditions regarding school principal standards. Variables are measured with instruments in the form of questionnaires. The results show that there are two main problems, namely gaps and deviations in the elementary school environment in Lubuk Mantilin Village.. The results of the first research are as follows, firstly, the gap includes several things a) leaderships quality gap, b) resource gap, c) treatment gap, d) implementations gap, e) communication gap. And as for the second result, the following are several deviations that may occur, a) administrative deviations, b) ethical deviations, c) deviations in curriculum implementation, d) principal deviations in assesment. The results of the two studies show that there are action to overcome and reprimand the accurrenre of gaps and deviations at SDN 50/VI Lubuk Mentilin based on 8 national educatonal standards, namely content standards, process standards, graduate competency standards, standards for educators and education staff.

Keywords : school principal, educational leader, disparities and iredularitie

PENDAHULUAN

Salah satu program unggulan pemerintah di sektor pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di tingkat nasional. Upaya peningkatan ini menjadi pusat perhatian program pemerintah yang diarahkan pada penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompeten. Dengan menitikberatkan pada mutu pendidikan, pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang setara dan bermutu, sehingga menghasilkan individu-individu yang siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. (Marsiti, 2011). Pemerintah juga mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mendukung peningkatan mutu ini, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan modern. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan ini, diharapkan Indonesia dapat memiliki generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

Di sisi lain, kebutuhan akan layanan pendidikan yang berkualitas juga menjadi tuntutan masyarakat. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan beragam pilihan program pendidikan yang dapat dipilih untuk pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, sudah menjadi tren bagi sebagian besar masyarakat bahwa memilih program dan institusi pendidikan yang

berkualitas tinggi akan memberikan jaminan bagi masa depan lulusannya. Kualitas suatu institusi pendidikan sering kali diukur dari mutu lulusannya. Sejauh mana lulusan tersebut memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk berinteraksi dalam masyarakat serta kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan menjadi indikator utama. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu tinggi telah menjadi orientasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan (seperti sekolah dan madrasah), serta masyarakat umum (Asrita, 2022).

Melalui sinergi yang kuat di antara semua pihak terkait, diharapkan sistem pendidikan yang ada mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan daya saing tinggi di dunia kerja. Pemerintah dan lembaga pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas melalui berbagai inisiatif dan program strategis, termasuk peningkatan fasilitas, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional dapat terwujud (Asrita, 2022).

Oleh karena itu, masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana kepala sekolah, sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, menangani kesenjangan dan penyimpangan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepala sekolah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai

ketidaksesuaian serta ketidakseimbangan yang mungkin ada dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai keberhasilan akademis. Dengan memahami peran kepemimpinan kepala sekolah dalam konteks ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepala sekolah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai ketidaksesuaian serta ketidakseimbangan yang mungkin ada di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode evaluatif yang bertujuan untuk menganalisis kompetensi kepala sekolah melalui pendekatan evaluasi program. Pendekatan ini tidak hanya memeriksa prosedur dan proses implementasi program, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan antara program yang ada dengan variabel-variabel yang ditetapkan dalam Discrepancy Model. Model ini mengonfirmasi apakah program mencapai standar atau target yang telah ditetapkan sebagai acuan.

Dalam konteks ini, jika tidak ada perbedaan antara kondisi aktual dengan target yang diinginkan (acuan), maka

program tersebut dianggap sangat efektif. Namun, jika terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi aktual dan target (acuan), maka program tersebut dinilai tidak efektif. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program pendidikan dengan cara yang sistematis dan objektif, sehingga dapat memberikan panduan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam manajemen pendidikan (Kantun, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan kunci utama kemajuan suatu bangsa dan selalu menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Pendidikan nasional terus-menerus dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks dan menantang. Meskipun upaya perbaikan dan reformasi terus dilakukan, masih banyak aspek dalam sistem pendidikan yang memerlukan perhatian khusus. Kualitas pendidikan yang belum merata, kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah mutu tenaga pendidik merupakan beberapa contoh permasalahan yang sering dihadapi. Di tengah upaya peningkatan, isu-isu ini tetap menjadi fokus utama berbagai pihak yang peduli dengan masa depan pendidikan di Indonesia. (Vito & Krisnani, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian mengungkap bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menghadapi dua masalah utama di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat, yaitu kesenjangan dan penyimpangan.

Kesenjangan mencakup perbedaan

dalam kualitas kepemimpinan di antara kepala sekolah yang berpengaruh pada distribusi sumber daya dan fasilitas pendidikan. Kepala sekolah dengan keterampilan kepemimpinan yang lebih baik mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung, sementara yang lainnya mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola sekolah secara efisien. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, dimana beberapa kelas mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dibandingkan yang lain.

Sementara itu, penyimpangan mencakup tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standar atau regulasi pendidikan yang berlaku. Penyimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan anggaran yang tidak transparan, praktik-praktik yang tidak etis, atau penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan ini tidak hanya merusak integritas institusi pendidikan tetapi juga menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan memahami kedua masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta mengurangi penyimpangan dalam manajemen sekolah di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat.

Adapun kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia sangat terasa dan memprihatinkan, terutama di kalangan golongan ekonomi rendah dan daerah pelosok. Kesenjangan sosial ini

mencakup perbedaan signifikan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dan mereka yang kurang mampu. Di daerah perkotaan, fasilitas pendidikan cenderung lebih lengkap dan modern, sedangkan di daerah terpencil, sarana pendidikan sering kali minim dan tidak memadai. Selain itu, guru-guru yang berkompeten dan berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah pedesaan, kualitas tenaga pendidik sering kali tidak merata. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di daerah terpencil, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Hujaimah et al., 2023). Beberapa contoh kesenjangan yang mungkin terjadi dalam konteks pendidikan antara lain:

- a) Kesenjangan kualitas pendidikan: Perbedaan dalam standar dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta di antara sekolah-sekolah dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Ini mencakup perbedaan dalam fasilitas, kurikulum, dan kemampuan guru yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan.
- b) Kesenjangan sumber daya: Disparitas dalam akses dan ketersediaan sumber daya pendidikan seperti buku teks, fasilitas laboratorium, teknologi pendidikan, dan dukungan keuangan. Sekolah yang kurang mendapatkan

dukungan sumber daya ini cenderung mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa mereka.

- c) Kesenjangan perlakuan: Perlakuan yang tidak adil terhadap siswa atau staf berdasarkan preferensi pribadi, bias, atau diskriminasi. Hal ini dapat mencakup pengaturan kelas atau penugasan yang tidak merata, penilaian yang tidak objektif, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan kebijakan sekolah.
- d) Kesenjangan dalam implementasi kebijakan: Perbedaan dalam cara dan tingkat kepatuhan sekolah terhadap kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa sekolah mungkin lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan baru atau kurikulum yang direvisi, sementara yang lain mungkin mengalami hambatan atau resistensi dalam mengadopsi perubahan tersebut secara efektif.
- e) Kesenjangan komunikasi: Ketidakjelasan atau kurangnya komunikasi antara berbagai pihak terkait pendidikan seperti guru, siswa, orang tua, dan administrasi sekolah. Kesenjangan komunikasi ini dapat menghambat alur informasi yang efektif tentang kebijakan, perkembangan siswa, atau kebutuhan pendidikan khusus yang mungkin dimiliki siswa. (Haris & Azca, 2017).

Beberapa contoh penyimpangan yang mungkin terjadi dalam konteks pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Penyimpangan administratif: Praktik-praktik yang melanggar prosedur

administratif yang telah ditetapkan, seperti penggunaan anggaran sekolah secara tidak transparan, manipulasi data keuangan, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan administrasi sekolah.

- b) Penyimpangan etika: Tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika dalam kehidupan profesional, seperti korupsi, nepotisme, atau kolusi di dalam lingkungan pendidikan. Penyimpangan etika ini dapat merusak integritas institusi pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
- c) Penyimpangan dalam pelaksanaan kurikulum: Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, misalnya penekanan yang berlebihan pada aspek-aspek tertentu dalam kurikulum atau pengabaian terhadap materi yang seharusnya diajarkan kepada siswa.
- d) Penyimpangan kepala sekolah dalam penilaian: Perlakuan yang tidak adil atau tidak objektif dari kepala sekolah dalam menilai kinerja staf pengajar atau prestasi akademis siswa. Hal ini bisa mencakup penilaian yang didasarkan pada preferensi pribadi atau diskriminasi, serta manipulasi hasil evaluasi untuk mendukung tujuan tertentu. (Jannah, 2020).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan dalam hak akses pendidikan di Indonesia merupakan isu yang mendesak untuk segera ditangani. Ketimpangan hak akses ini memiliki dampak signifikan dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Berdasarkan studi, kondisi masyarakat di Indonesia masih

menghadapi tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat partisipasi sekolah.

Masalah kesenjangan ini terlihat jelas antara kelompok ekonomi rendah dan mereka yang berada di daerah terpencil dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan atau memiliki latar belakang ekonomi lebih baik. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, yang berakibat pada terbatasnya kesempatan mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan. Tingginya angka kemiskinan juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi sekolah, karena banyak anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Untuk mengatasi isu ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Program-program beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta pelatihan bagi tenaga pendidik adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi kesenjangan ini. Dengan demikian, diharapkan semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, dapat menikmati hak yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas. (Anwar, 2022).

PEMBAHASAN

Permasalahan pertama yaitu kesenjangan dilingkungan SD (Sekolah Dasar) terkait dengan kepala sekolah

biasanya merujuk pada perbedaan atau ketidak seimbangan dalam hal kualitas kepemimpinan, manajemen sekolah atau perlakuan terhadap siswa dan staf beberapa kesenjangan yang mungkin terjadi meliputi :

- a. Perbedaan kualitas kepemimpinan di antara beberapa kepala sekolah bisa menyebabkan beberapa dari mereka memiliki keterampilan kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Kesenjangan ini dapat berdampak signifikan pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Kepala sekolah yang memiliki keterampilan kepemimpinan unggul cenderung mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung, sementara kepala sekolah dengan keterampilan kepemimpinan yang kurang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola sekolah secara efisien, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa.
- b. Kesenjangan dalam distribusi sumber daya juga menjadi masalah, dimana kepala sekolah tidak merata dalam mendistribusikan sumber daya atau fasilitas sekolah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai kelas. Ketidakmerataan dalam akses terhadap buku, teknologi, dan fasilitas belajar lainnya bisa membuat beberapa siswa tertinggal dibandingkan rekan-rekan mereka. Kepala sekolah yang tidak berhasil mendistribusikan sumber daya secara adil berpotensi memperparah ketimpangan ini, sehingga menyebabkan perbedaan signifikan dalam hasil belajar

dan kesempatan pendidikan yang diterima oleh siswa di satu sekolah yang sama.

- c. Kesenjangan perlakuan juga merupakan masalah yang sering ditemui, dimana kepala sekolah memberikan perlakuan yang tidak adil kepada staf atau siswa berdasarkan favoritisme, bias, atau diskriminasi. Hal ini bisa terjadi ketika kepala sekolah lebih cenderung memberikan perhatian dan peluang kepada individu-individu tertentu yang disukai atau memiliki hubungan pribadi yang lebih dekat dengan mereka. Selain itu, bias dalam penilaian prestasi atau kemampuan siswa serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti berdasarkan suku, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi, juga dapat menciptakan ketidakadilan di lingkungan sekolah.
- d. Kesenjangan dalam implementasi kebijakan juga menjadi masalah yang signifikan, di mana beberapa kepala sekolah lebih relatif dalam menerapkan kebijakan sekolah atau kurikulum dibandingkan yang lain. Perbedaan ini bisa mencakup cara interpretasi dan prioritas terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan setempat. Kepala sekolah yang efektif biasanya mampu mengimplementasikan kebijakan dengan konsisten dan efisien, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

- e. Kesenjangan komunikasi mungkin ada kesenjangan dalam hal komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, siswa, atau orang tua yang dapat berdampak pada kinerja dan iklim sekolah.

Mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas yang adil dan setara.

Penyimpangan adalah konsep masalah sosial berkaitan dengan pelanggaran norma artinya sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat (Tola & Suardi, 2017).

Penyimpangan dilingkungan Sekolah Dasar (SD) terkait dengan kepala sekolah bisa merujuk pada berbagai hal tergantung pada konteksnya. Namun umumnya, penyimpangan merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar aturan.norma atau standar yang berlaku.

Berikut beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi :

- a. Penyimpangan administratif kepala sekolah mungkin melakukan penyimpangan dalam hal manajemen sekolah seperti menyalahgunaan dana sekolah, memalsukan dokumen atau tidak mematuhi prosedur administratif yang telah ditetapkan.
- b. Penyimpangan etika ini bisa mencakup segala bentuk perilaku yang tidak etis seperti perilaku deskriminatif, pelecehan, atau penyalahgunaan wewenang.

c. Penyimpangan dalam pelaksanaan kurikulum jika kepala sekolah tidak mengikuti atau mematuhi kurikulum yang telah ditetapkan oleh otonom pendidikan ini bisa dianggap sebagai penyimpangan.

d. Penyimpangan kepala sekolah dalam penilaian jika kepala sekolah mempengaruhi atau manipulasi hasil penelitian siswa secara tidak adil atau tidak objektif, ini bisa dianggap sebagai penyimpangan.

Penting untuk menegur dan menaungi penyimpangan ini agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan kondusif bagi semua siswa dan sekolah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mengenai kesenjangan dan penyimpangan di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses yang setara dan adil terhadap pendidikan berkualitas. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, pelatihan guru yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta peningkatan infrastruktur pendidikan seperti fasilitas dan teknologi pendukung.

Dimana ada 2 pokok pembahasan yaitu kesenjangan dan penyimpangan di lingkungan sekolah dasar di. Adapun

hasil penelitian pertama sebagai berikut ;

pertama kesenjangan meliputi beberapa hal

a).Kesenjangan kualitas kepemimpinan

b).Kesenjangan sumber daya

c).Kesenjangan perlakuan

d).Kesenjangan dalam implementasi

e).Kesenjangan komunikasi dan

adapun hasil kedua sebagai berikut beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi

a).Penyimpangan administratif

b).Penyimpangan etika

c).Penyimpangan dalam pelaksanaan kurikulum

d).Penyimpangan kepala sekolah dalam penilaian.

Dari kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tindakan untuk mengatasi dan menegur terjadinya kesenjangan dan penyimpangan di SDN 50/VI Lubuk Mantilin Kec. Jangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15.

Asrita, R. (2022). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Hijri*, 11(2), 159.

Haris, H., & Azca, M. N. (2017). Kata kunci : Kesenjangan Kualitas Pendidikan, Perserikatan/Lembaga Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 & SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, dan Reproduksi Sosial Pierre Bourdieu. 1–2.

Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Fiqri, R., Sasmita, P., Salsabila, N., Mariani, M., Nugraha, D. M., Santoso, G., Indonesia, U. P., & Jakarta, U. M. (2023). Faktor ,

- Penyebab , dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Jurnal Pendidikan. Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT), 02(06), 142–148.
- Jannah, L. K. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan. *Islamika*, 2(1), 129–139.
- Kantun, S. (n.d.). Penelitian Evaluatif Sebagai Satu Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Marsiti, C. I. R. (2011). Efforts to Improve the Quality of Vocational High School Education through Developing Teacher Professionalism. In *Journal of Vocational Education* (Vol. 1, Issue 1, pp. 157–168).
- Tola, S. F., & Suardi, S. (2017). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 1–10.
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–251.
- Departemen Agama RI, UU dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006.
- Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2008.
- F. Tjiptono dan A. Diana, *Total Quality Management (TQM) edisi revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).
- F. Tjiptono. dan Chandra, G., *Service, Quality, & Statisfaction*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Fokus Media Tim Redaksi, *Standar Nasional Pendidikan*, Bandung: Fokus Media, 2005.